



PERENCANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DI KABUPATEN SUBANG: SEBUAH TINJAUAN

Sutangsa¹, Endang Suryana²

^{1,2}Universitas Subang

History Article

Article history:

Received Feb 9, 2023

Approved Feb 28, 2023

Keywords:

Community Empowerment, Volunteer, Firefighters

ABSTRACT

The progress of development in the Subang Regency area demands the readiness of the local government to further improve services in various aspects/sectors including health, education, economy, as well as improving security services, community welfare, and community protection including fire affairs in accordance with existing laws and regulations. apply. With the condition of a fairly large area, the amount of infrastructure owned and the existing human resources, the responsibility for preventing and overcoming fire hazards is the responsibility of all of us, in this case the government, the community and themselves. For this reason, community empowerment through the formation of volunteer firefighters is needed in order to create self-reliance and help firefighters achieve a level of response time. The theory used in this research is planning theory and community empowerment theory. The meaning contained in planning is the basis for achieving the goals of better and orderly social change. While the theory of community empowerment explains the existence of power and the ability to give to other parties. This theory reveals that people involved in the empowerment process must have the awareness to participate actively and have the ability to increase their capacity. This research was conducted using qualitative research methods. The use of this method is intended to understand in depth the phenomenon of the community empowerment program planning process through the Formation of Volunteer Firefighters. The location of this research is the Civil Service Police Unit and the Subang Regency Fire Department. The focus of this research lies in the stages of the planning process for the empowerment program which makes the subject groups of government-assisted empowerment.

ABSTRAK

Kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Subang menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam berbagai aspek/sektor antara lain kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta meningkatkan pelayanan ketenteraman, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan masyarakat termasuk urusan kebakaran di sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kondisi wilayah yang cukup luas, jumlah infrastruktur yang dimiliki dan sumber daya manusia yang ada, maka tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran menjadi tanggung jawab kita semua, dalam hal ini pemerintah, masyarakat dan dirinya. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran sangat diperlukan agar tercipta ketangguhan secara mandiri dan membantu petugas pemadam kebakaran mencapai tingkat waktu tanggap. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perencanaan dan teori pemberdayaan masyarakat. Makna yang terkandung dalam perencanaan merupakan landasan untuk mencapai tujuan perubahan masyarakat yang lebih baik dan teratur. Sedangkan teori pemberdayaan masyarakat menjelaskan adanya kekuasaan dan kemampuan memberi kepada pihak lain. Teori ini mengungkapkan bahwa orang yang terlibat dalam proses pemberdayaan harus memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam fenomena proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran. Lokasi penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Fokus penelitian ini terletak pada tahapan proses perencanaan program pemberdayaan yang menjadikan kelompok subjek pemberdayaan binaan pemerintah.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: sutangsa@unsub.ac.id

PENDAHULUAN

Kabupaten Subang bagian dari Propinsi Jawa Barat, geografisnya sebelah utara dengan batas koordinatnya 1070 31' - 1070 54' Bujur Timur dan 60 11' - 60 49' Lintang Selatan, memiliki luas wilayah ± 2.052 KM² dengan jumlah penduduk 1.622.654 jiwa, terbagi menjadi 30 Kecamatan yang di dalamnya terdapat 8 Kelurahan dan 253 Desa, serta memiliki potensi wilayah bencana yang sangat lengkap yaitu memiliki daerah pegunungan (wilayah selatan), daerah dataran rendah (wilayah tengah), dan Lautan (wilayah utara) berada di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Subang, 2023).

Kabupaten Subang yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang signifikan terlihat jelas dari sektor pariwisata dan industri, hadirnya pembangunan-pembangunan program legislatif nasional di Kabupaten Subang seperti pembangunan jalan Tol Astra Cipali, Pelabuhan

Patimban, dan Waduk Sadawarna memberikan warna tersendiri pada kemajuan pembangunan dan menjadi akses dalam meningkatnya urbanisasi khususnya di wilayah Kabupaten Subang. Kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Subang menuntut kesiapan pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan di berbagai aspek/sektor diantaranya kesehatan, pendidikan, perekonomian, serta peningkatan pada pelayanan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat termasuk urusan kebakaran sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota (Fitri, 2022).

Instansi yang berwenang dan diberi tanggung jawab terhadap masalah kebakaran adalah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, yang di tindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Tugas, Pokok Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpoldam Kabupaten Subang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar urusan ketentraman sesuai pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terbagi dalam 3 sub urusan yaitu: (1) sub urusan keamanan ketertiban umum; (2) sub urusan pemadam kebakaran, dan (3) sub urusan bencana (Subang, 2023).

Merujuk UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diantaranya: (1) Melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun; (2) Melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; (3) Melakukan investigasi kejadian kebakaran, dan (4) Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran Pemerintah daerah Kabupaten Subang melalui Dinas Pemadam Kebakaran itu selalu siap untuk melayani dan selalu hadir seratus persen dalam setiap insiden kebakaran untuk seluruh lapisan masyarakat (Suryana, 2023).

Perencanaan juga merupakan hal harus dipersiapkan secara serius, karena dalam perencanaan terkandung pengertian masa yang akan datang dan adanya ketidakpastian dalam satu organisasi, perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan sasaran dan bagaimana untuk mencapai sasaran tersebut.

Perencanaan sering juga di artikan sebagai suatu proses. Proses perencanaan adalah bagian tahapan rasional di dalam penyusunan rencana. Sifat-sifat yang dipunyai dalam proses: (1) tujuan harus disesuaikan; (2) keterbatasan juga harus disesuaikan; (teknik dan kebutuhan juga harus disesuaikan dengan teknik serta kebutuhan tertentu. Proses ini semula merupakan perencanaan konvensional, yang bisa dibilang juga *Classical Planning Process* atau *Geddesian Planning Process*. Proses perencanaan konvensional dibilang proses yang cukup terbuka guna menghasilkan sesuatu yang terbuka pula (tanpa *feedback*). Dalam perencanaan, menginput informasi merupakan data-data, begitupun output adalah produk rencana, begitupun produk rencana adalah hasil dari analisis yang berkaitan dari data atau informasi (Wikipedia, 2023).

Pembangunan hasil dari perencanaan adalah dipake untuk melahirkan suatu tindakan para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah dalam membangun atau mengembangkan

dari potensi walayahnya baik desa, daerah serta negara. Pendekatan partisipatif dalam sebuah perencanaan merupakan metode atau strategi pembangunan guna melaksanakan proses mengambil kebijakan atau keputusan publik, yang semuanya tergantung dari masyarakat itu sendiri dalam melibatkan diri dalam proses pembangunan. (Akbar et al., 2018) (dalam (Inati, 2022)).

Sebagaimana yang disebutkan oleh George R. Terry perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. Untuk itu, diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola tindakan untuk mewujudkan sebuah rencana kegiatan ke depan (Annas, 2022).

Robbins dan Coulter (2002) mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang menyangkut penetapan tujuan organisasi, menetapkan keseluruhan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan suatu rencana yang menyeluruh yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan dalam organisasi. Perencanaan merupakan fungsi paling penting, perencanaan merupakan landasan pokok fungsi-fungsi yang lain. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang tidak memiliki titik akhir (Suryana, 2023).

Berdasarkan definisi di atas, perencanaan adalah kegiatan masyarakat atau lembaga yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan strategi yang optimal untuk mencapai serangkaian tujuan-tujuan yang diinginkan. Pengertian perencanaan didefinisikan secara berbeda-beda, dalam pengertian paling sederhana, perencanaan adalah suatu rasa rasional untuk mempersiapkan masa depan. Disisi lain perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Pengertian pemberdayaan sudah banyak ditulis oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya adalah, “daya” merupakan katqa dasar dan ditambah awalan “ber”, yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan. Maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar obyek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan (Maryani, 2019).

Pemahaman terkait dengan masyarakat sudah banyak dibahas oleh para ahli ilmu kemasyarakatan. Sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat sejumlah masyarakat, memiliki budaya yang sama, serta relatif independen tidak terpengaruh dengan orang luar di wilayah itu.

Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat akan berhasil tergantung kepada masyarakat itu sendiri apakah dalam berpartisipasi akan aktif atau pasif Jhon J. Macionis, (1997) (dalam (Maryani, 2019)).

Pemberdayaan masyarakat menurut Vitayala diartikan sebagai proses pengembangan berbagai kemampuan sumber daya manusia, alat dalam melakukan kegiatan, dan faktor lainnya membahas tentang pengembangan, pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan. Pendampingan adalah ikut sertanya pendamping dengan masyarakat, selanjutnya penyuluhan dimaknai sebagai proses pembinaan terhadap masyarakat, dan pelayanan merupakan fungsi pengendali berbagai aset fisik dan nonfisik yang dibutuhkan oleh masyarakat (Chodijah, 2022).

Sumaryadi (2005: 94-96) membahas 5 prinsip yang paling elementer terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat ini:

- a. Setiap kegiatan yang dikelolanya memerlukan *break event* dalam pemberdayaan masyarakat ini, orientasinya akan berbeda dalam cara penanganannya tidak seperti organisasi bisnis, dimana setiap keuntungan dalam pemberdayaan masyarakat ini

akan didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan lainnya dalam pembangunan.

- b. Program pemberdayaan masyarakat partisipasinya akan selalu dilibatkan baik dalam perencanaan maupun kegiatan pelaksanaannya.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam segi pelaksanaan dalam kegiatan pelatihan ada unsur-unsur yang tidak bisa dipisahkan seperti pembangunan fisik.
- d. Usaha Pemberdayaan masyarakat dalam implementasinya akan memaksimalkan sumber daya masyarakat itu sendiri, baik dalam pembiayaan yang sumbernya dari pemerintah maupun dari pihak swasta serta sumber-sumber yang lainnya.
- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan Pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro (Nyoman, 2005).

Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dilakukan oleh bagian perencanaan melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sub kegiatan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk berpartisipasi guna mewujudkan lingkungan dari bahaya kebakaran secara sukarela istilah lain dari dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.

Apa yang dimaksud dengan relawan? Relawan sering disebut orang yang biasa membantu tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih apapun, atau biasa disebut sukarela. Mengandung makna yang apa yang dilakukan adalah perbuatan rela, mulia, ikhlas serta tulus, menyiratkan sebuah kemuliaan hati para pelakunya. Keberadaan relawan biasanya selalu tidak terduga dimana apabila ada musibah atau bencana alam, dalam situasi yang sulit dimana banyak orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan yang sifatnya segera (Abidah, 2012).

Schroeder (1998) mengemukakan yang namanya relawan adalah orang per orang yang sering disebut individu yang suka rela memberikan sumbangan tenaga, jasa, kemampuan serta waktunya tanpa mengharapkan sesuatu (tanpa pamrih) atau tanpa mengharapkan keuntungan materi dari sebuah pelayanan di dalam organisasi yang mengorganisasi suatu kegiatan tertentu secara formal (Blog, 2022).

Church (dalam Nurmala, 2003) area pelayanan yang ditangani oleh para relawan ada 3 (tiga), yaitu:

1. *Administration*

Area yang pertama, relawan akan mengerjakan pekerjaan dengan para profesional, yang diharapkan berbagi pengalaman, pengetahuan, penilaian dan waktu yang bisa mempermudah bagi para profesional tersebut.

2. *Working Service*

Area yang kedua, relawan membantu dengan kemampuan serta perhatian yang mereka punyai, secara fisik serta usaha membantu dalam menjalankan tugas yang dilaksanakan di dalam suatu organisasi maupun kegiatan dalam suatu program.

3. *Fund-raising*

Area ketiga, relawan bertugas menggalang dana dalam suatu organisasi yang dibutuhkan demi berjalannya program tertentu dalam suatu organisasi. pendapat tersebut sejalan dengan penjelasan dalam kegiatan asosiasi kerelawanan yang dikemukakan oleh Mutchler, Burr & Caro (2003). Mitchell mengemukakan empat jenis relawan yang terkait dengan peran relawan, yaitu:

- a) *Policy making volunteers*: Relawan yang membuat gugus, panel peninjauan, komisi dan dewan serta tugas dalam sebuah kebijakan yang dilakukan relawan;
- b) *Administrative volunteers*: Relawan administrasi yang memberikan suport dalam perkantoran melalui kegiatan atau aktivitas dengan contohnya, mengelola atau pengolahan kata, mengelola dan mengkoordinasi jadwal, dan membantu mengurus surat-menyurat;
- c) *Advocacy volunteers*: Relawan di dalam keadvokasian yang memberikan suport dengan mengupayakan dana, membantu menulis surat menyurat dan menghubungi anggota dewan perwakilan rakyat, memberi kesaksian pada sidang publik, mengorganisir setiap suport dari sebuah komunitas, serta mempunyai pekerjaan dibidang hubungan masyarakat;
- d) *Direct service volunteers*: Relawan dalam pelayanan langsung bisa saja dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas seperti konseling, rekreasi, dan pengajaran. Tendensi untuk era ini adalah mengkaitkan klien, terutama yang melatih relawan sebagai bagian dari rencana intervensi keseluruhan. Relawan yang sudah terlatih biasanya banyak menangani dan merespon saluran telepon yang perlu penanganan responsif atau hotline yang bersumber dari komunitas yang sesuai (Abidah, 2012).

Organisasi yang bertugas di dinas pemadam kebakaran mempunyai tugas yang sangat vital dalam bidang pelayanan, memperhatikan kondisi lingkungan dan mengantisipasi masyarakat baik dari segi memberi pertolongan aksi untuk action pemadaman dan pencegahan kebakaran (Rahmadhani, 2021). Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) telah ada di berbagai daerah di Indonesia, yang keberadaannya diatur dengan peraturan daerah masing-masing. Setiap Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) ada yang memiliki beberapa unit pelayanan teknis dan tersebar di daerah-daerah Kabupaten/Kota. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) adalah lembaga dalam penanggulangan bencana keberadaannya yang langsung berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun tanggung jawab dari Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan kepentingan umum, ketertiban, keselamatan dan ketentraman masyarakat (Fiondra, 2023).

REDKAR ini menampung Satuan Relawan Kebakaran (SATLATKAR), atau Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) atau mewadahi kelompok relawan lain. Organisasi REDKAR ini dibangun atas inisiatif dari masyarakat itu sendiri dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) diharapkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dapat meningkat, membantu pencapaian mutu layanan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran, menciptakan sinergi antara Satuan Kerja yang membidangi Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat dan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsi serta memberi gambaran secara sistematis mengenai Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Pemadam Kebakaran di Kabupaten Subang. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Relawan Kebakaran (REDKAR) di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang (Suryana, 2023). Metode

seperti itu perlu digunakan untuk menemukan objek penelitian dan pengetahuan yang seluas-luasnya (Widodo, 2000).

Sejalan dengan pendapat tersebut, pendekatan yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai penelitian terdahulu dan penelitian yang masih memiliki relevansi dengan penelitian ini. Data tersebut diperlukan serta dikumpulkan untuk diolah agar menjadi suatu materi, yang bisa diketemukan hasilnya dalam penelitian ini Abdussamad & SIK. (2021) dalam (Sutangsa, 2023).

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk penelitian murni, karena penelitian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan peneliti sendiri dalam kerangka akademis. Kebutuhan dan keinginan peneliti untuk pemenuhan penelitian murni lebih banyak ditujukan, agar kebebasan penelitian bisa menentukan permasalahan yang ditelitinya. Dengan kata lain fokus penelitian ada pada logika dan rancangan penelitian yang dibuat oleh peneliti sendiri (Prasetyo, 2005).

Cross-sectional, mengandung arti menyangkut masalah waktu, karena penelitian ini hanya dilakukan dalam satu waktu. Penelitian ini digunakan dalam waktu tertentu yaitu tahun 2023, karena penelitian tidak akan digunakan dalam waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Walaupun penelitian dilakukan dalam satu waktu tertentu tentu tidak dibatasi pada hitungan minggu, hitungan bulan, atau hitungan tahun saja akan tetapi sampai penelitian itu selesai. Jadi ketika peneliti merasa ada data-data yang tidak lengkap maka peneliti dapat kembali ke lapangan untuk melengkapi data (Prasetyo, 2005).

Dari kajian definisi-definisi penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dialami oleh subjek penelitian dilihat dari beberapa aspek dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta atur bahasa dalam konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Program Perencanaan di Era Transparansi

Tahapan dalam pembangunan baik pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisik diawali dengan tahapan perencanaan, karena pada tahap awal inilah gambaran menyeluruh dan detail keberadaan sebuah inisiatif di proyeksikan. Pada dasarnya perencanaan yang baik akan memiliki kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan atau implementasi satu program secara keseluruhan, karena apa yang dilaksanakan pada siklus selanjutnya adalah melaksanakan atau mengimplementasikan rencana dasar yang sudah disepakati.

Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang dengan menggunakan prinsip perencanaan menurut Jamshid Garajedagi dan Russel Ackoft (dalam Ginandjar Kartasmita 1997:52-53) dimana menyebutkan bahwa perencanaan terdiri dari tiga prinsip yaitu; (1) Parsitipatif; (2) Berkesinambungan; dan (3) Holistik.

Parsitipatif; konsep partisipatif tidak hanya berorientasi pada keikutsertaan masyarakat tetapi juga berorientasi pada pemberdayaan (*empowerment*); mengenal adanya desentralisasi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing; diselenggarakan melalui organisasi dan manajemen perencanaan yang efisien dan produktif; menjamin proses networking berlangsung efektif; dan mengakui transparansi (Abe, 2005).

Berkesinambungan ; bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan yang terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran (*relapse*). Sutamihardja (2004) menyatakan sasaran

pembangunan berkelanjutan mencangkup upaya-upaya untuk terwujudnya: pemerataan manfaat hasil pembangunan, pengamanan sumberdaya, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya, kesejahteraan rakyat, mempertahankan manfaat pembangunan, menjaga mutu atau kualitas hidup manusia.

Holistik; menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat dilihat pada satu sisi (sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Dalam hal ini penulis juga mengidentifikasi 5 indikator prinsip perencanaan parsipatif menurut Abe (2002) yakni berorientasi pada pemberdayaan (*empowerment*); Mengenal adanya desentralisasi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing; Diselenggarakan melalui organisasi dan manajemen perencanaan yang efektif dan produktif; menjamin proses pembangunan networking berlangsung efektif, dan mengakui transparansi.

2. Pemberdayaan adalah Pembelajaran Seumur Hidup

Pemberdayaan rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan diberdayakan agar mampu atau menguasai sesuatu supaya (atau berkuasa atas) penghidupannya. Proses pemberdayaan dimana orang agar mampu dan menjadi cukup kuat untuk bisa berkontribusi serta berpartisipasi dalam membagi pengontrolan atas, dan bisa mempengaruhi setiap kejadian-kejadian yang terjadi minimal untuk mempengaruhi diri pribadi dalam kehidupannya.

Pemberdayaan menitikberatkan pada setiap individu agar mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan agar orang itu berdaya guna bisa mempengaruhi kepribadian dalam menjalani kehidupannya dan berbagi dengan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan juga merujuk pada skill orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, agar memiliki kemampuan mencari sumber-sumber yang produktif. Secara lebih luas bisa juga orang atau individu tersebut untuk bisa meningkatkan penghasilannya melalui perolehan barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berkontribusi serta bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan minimal di daerah dimana mereka bertempat tinggal.

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual Sumber Daya Manusia (SDM), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek yang disebutkan tadi diharapkan bisa jadi ditumbuh kembangkan menjadi aspek ketahanan sosial-budaya, ketahanan ekonomi, ketahanan politik, ketahanan keamanan dan ketahanan lingkungan.

Walaupun pemberdayaan masyarakat bukan lahir melalui konsep ekonomi, akan tetapi ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut aspek kehidupan dasar manusia, seperti gizi anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan, serta aspek lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Untuk itu pengentasan kemiskinan harus dilakukan agar semua potensi yang dipunyai untuk disuport dan dikembangkan untuk melawan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan.

Tahap Pemberdayaan Menurut Sumaryadi (2005:97-98) menggambarkan konsep pemberdayaan dalam tiga tahapan yaitu; (a) tahapan politis, (b) tahapan organisasi, dan (c) tahapan individu. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Tahapan politis dan nasional, pemberdayaan secara perlahan melekat dalam bahasa kita setiap hari sebagai *mechanism of self-help for people* (mekanisme bantuan dari dan bagi orang lain). Berdasarkan asumsi setiap orang yang ingin merubah sesuatu adalah harus didasarkan pada keinginan diri sendiri, ketergantungan pada orang lain secara bertahap harus dihilangkan dan menjadi mandiri. Pada skala nasional *self-dependency movement* (gerakan pada kemampuan diri sendiri) harus menjadi prioritas dan terus mendapat tempat. Faktor ekonomi masyarakat harus di dorong menuju kepada efisiensi agar bisa lebih besar mendorong pemerintah, itulah alasan yang secara pragmatis. Organisasi dari masyarakat untuk mencari cara-cara alternatif untuk menjadi lebih efisien, yang merupakan tanggapan terhadap meningkatkan daya dan ancaman pelayanan alternatif dari para pesaing.
- b. Organisasi, pemberdayaan mempunyai daya tarik. Konsep baru atau gagasan-gagasan dari pemberdayaan harus dilaksanakan agar lebih aktual daripada banyak teori-teori dan motivasi kerja yang dianggap sudah ketinggalan jaman. "Organisasi seperti *total quality, habitual improvement, selfdirected team work, internal customer, competence management*" dan sebagainya.
- c. Individu, proses pemberdayaan berbeda untuk setiap individu. Prosesnya sudah ada yang dianggap tidak relevan lagi, atau ada juga dalam pelaksanaannya prosesnya disingkat. Setiap individu ada yang sudah mengubah kehidupan mereka guna mencapai tujuan hidup dan mencapai target yang dianggap tidak mungkin. Mereka sudah membuka jalan bagi perkembangan dan pertumbuhan yang menguntungkan mereka maupun organisasi bila tim individu yang di berdayakan secara kolektif berkerja sama maka sinergi tercapai (Sumaryadi, 2005).

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan strategi, yang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan barang baru. Usaha pengembangan masyarakat dimasa lampau selalu dikaitkan dalam konteks perjuangan kemerdekaan, di masa kini kegiatan pemberdayaan masyarakat ini berorientasi pada partisipasi pembangunan dalam konteks transformasi sosial.

3. Strategi Memaksimalkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian dan Potensi Sumber Daya Manusia

Sumaryadi (2005:150) mengemukakan pendekatan strategi yang digunakan ada tiga dalam proses pemberdayaan masyarakat itu, antara lain:

- a. *The welfare approach*, pendekatan yang dimaksudkan adalah memberikan stimulus atau bantuan, kepada kelompok tertentu, contohnya; memberi bantuan kepada masyarakat atau individu yang terkena musibah bencana alam, pendekatan ini tidak disebut memberdayakan rakyat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat.
- b. *The development approach*, pendekatan ini menyandarkan perhatian terhadap pembangunan guna meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat.
- c. *The empowerment approach*, pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakkemampuannya. Ketiga pendekatan ini banyak diadopsi oleh LSM-LSM di Indonesia dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat.

Kartasmita (1995:95) dalam Sumaryadi (2005:150) juga mengemukakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Membuat iklim atau suasana yang kondusif guna menciptakan potensi masyarakat untuk berkembang. Asumsi seperti ini setiap individu dan kelompok masyarakat yang memiliki potensi tadi bisa terus dikembangkan.
- b. Membuat masyarakat dalam potensi dan daya yang dipunyai oleh masyarakat bisa diperkuat, dengan strategi menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan fasilitas yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat yang paling bawah.
- c. Membuat dalam pemberdayaan ini rakyat merasa dilindungi dan dibela kepentingannya, terutama masyarakat yang lemah.

4. Tolok Ukur Keberhasilan Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran

Program-program pembangunan di era orde baru sekitar tahun 1990-an yang diawali dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) disini peran pemerintah menunjukkan programnya dalam mengentaskan kemiskinan dan telah menunjukkan tekadnya dan sekaligus sebagai bagian dari perwujudan pembangunan alternative yang melihat pentingnya manusia (masyarakat), tidak lagi sebagai objek, tetapi subjek pembangunan. Dalam konteks ini “partisipasi masyarakat sepenuhnya” dianggap sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Dalam pengertian konvensional, konsep pemberdayaan sebagai terjemahan *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu (1) *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mengalihkan otoritas ke pihak lain, (2) *to give ability to* atau *to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Indikator tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Dalam program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat, agar bisa dikonsentrasikan pada aspek sasaran perubahan. Tolok ukur keberhasilan pemberdayaan ada 5 (lima) dimensi; (a) kesejahteraan, (b) akses, (c) kesadaran kritis, (d) partisipasi, dan (e) kontrol. Kelima dimensi tersebut, melalui analisis harus bersifat dinamis dan saling menguatkan secara bersinergis satu sama lain saling melengkapi. Berikut uraiannya:

- a. Kesejahteraan, dimensi pertama ini kesejahteraan masyarakat harus diukur tingkat kecukupannya, atas kebutuhan yang paling elementer misalnya sandang, pangan, papan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
- b. Akses, dimensi yang kedua, ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Apabila akses tidak tersedia ini merupakan suatu hambatan atau penghalang, bagi terjadinya peningkatan kesejahteraan. Dalam dimensi ini adalah adanya kesenjangan, yang diakibatkan tidak adanya kesetaraan akses bagi sumber daya yang dimiliki oleh mereka, yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Dimaksudkan dengan sumber daya disini adalah; waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.
- c. Kesadaran kritis, dalam dimensi yang ketiga ini, kesadaran masyarakat dalam bidang keberdayaan suatu keharusan yang perlu dibangun dan ditumbuhkembangkan.
- d. Partisipasi, dalam dimensi ini, keterlibatan masyarakat dalam sebuah keberdayaan di dalam lembaga. Dalam pengertian yang lebih mendalam masyarakat ikut berpartisipasi

dan keandilannya bisa menjadi kontribusi dalam proses mengambil keputusan, dan kepentingan mereka otomatis tidak terabaikan.

- e. Kontrol, dimensi yang terakhir ini, dimana konteks lapisan masyarakat memegang dan mengontrol sumber daya. Dalam pengertian semua yang namanya masyarakat dapat memenuhi hak-hak, tidak hanya penguasa atau segelintir orang saja yang menikmati sumber daya tersebut. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengontrol, mengendalikan dan mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Berbagai pendapat atau definisi terkait dengan pemberdayaan semua menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses mengarahkan kepada suatu tujuan. Sebagai Proses pemberdayaan adalah tahapan kegiatan untuk memperkokoh kekuasaan atau keberdayaan masyarakat yang lemah, termasuk di dalamnya setiap masyarakat atau individu yang mengalami ketidak berdayaan finansial atau miskin. Sebagai tujuan pemberdayaan merujuk pada keadaan adanya keinginan untuk berubah secara sosial; masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya, masyarakat miskin yang berdaya, mempunyai kekuasaan dengan kemampuan pengetahuan yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, ataupun sosialnya seperti memiliki kepercayaan diri, mampu mengemukakan aspirasi, mata pencaharian, mandiri, di dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, serta bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan sosial yang sudah diprogramkan.

Berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka teori yang digunakan untuk mengukur Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang, menggunakan teori menurut (Sumaryadi, 2005:11) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan”. Selain itu pada dasarnya pemberdayaan masyarakat ini mempunyai tujuan yang lebih jauh seperti;

- a. Membangun mengembangkan memanusiakan manusia secara manusiawi yang berintegral dan berotentik dari masyarakat yang lemah, rentan, miskin perkantoran, adat yang terbelakang, kaum remaja yang mengais dan mendambakan pekerjaan, kaum disabilitas, serta kaum wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Pemberdayaan dalam konteks kemasyarakatan disini dimaksudkan berdaya secara sosial ekonomi, agar kelompok-kelompok masyarakat bisa mandiri untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, serta sanggup berperan di dalam pembangunan dan pengembangan dirinya.

Jadi pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dalam hal ini adalah menjadikan masyarakat semakin percaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan serta wawasan yang diperoleh dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat. Sehingga dengan percaya diri maka masyarakat akan mampu melakukan tindakan yang terukur dan terarah dalam mencegah bahaya kebakaran, serta di lain sisi juga dapat menunjang capaian kinerja pemadam kebakaran dalam mengejar *respon time* (waktu tanggap) pada wilayahnya.

KESIMPULAN

Berdasar pada uraian yang penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang akan lebih

efektif bilamana pemerintah membantu merencanakan pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat dan membantu merencanakan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat dengan mengacu pada lima dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari:

1. Kesejahteraan,
2. Akses,
3. Kesadaran kritis,
4. Partisipasi, dan
5. Kontrol.

Kategori analisis kelima dimensi tersebut, bersifat dinamis, saling berkaitan satu sama lain bersinergis secara keterhubungan, saling memperkokoh menguatkan serta saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2005). *Perencanaan Daerah Parsitipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri.
- Abidah, M. (2012). *Kebermaknaan Hidup Seorang Relawan*. Surabaya: Program Studi Psikologi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya.
- Annas, N. A. (2022). Program Penguatan Pendidikan Karakter pada Sekolah Boarding (Studi Multikasus di MA Al-HudaGorontalo). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Halaman 15896-15903.
- Blog. (2022). *Lindungi Hutan Edukasi Hutanpedia Lingkungan Bisnis Lestari*. Jakarta: Blog Lindungi Hutan.
- Chodijah, N. S. (2022). Strategi Gabungan Kelompok Tani Serbaguna dalam Memberdayakan Petani di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jember: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Soddiq* .
- Fiondra, E. d. (2023). Efektivitas Kerja Satuan Tugas Pemadam Kebakaran di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Agam. *Otentik Law Jurnal*, Volume 1 No. 1.
- Fitri, A. d. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana Kebakaran Pada Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, VOL. 2 , NO 1, 2022 (55-65) .
- Inati, U. d. (2022). Inovasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Ekowisata: Sebuah Kajian Pustaka Sistematis. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6 (1): 14-29.
- Maryani, D. d. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish Publisher.
- Myn, G. E. (2022). Etika Organisasi Pada Relawan Penakluk Api (RPA) Dalam Pemberdayaan Kepemudaan di Kota Samarinda. *Einsbie Grata Myn. JPKPM*, Vol.2 (2). 232-241.
- Nyoman, I. S. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama. Yogyakarta: Gava Media.
- Prasetyo, B. d. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahmadhani, S. (2021). Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang dalam Pencegahan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, volume 3, Nomor 3.
- Subang, P. D. (2023). *Topografi, Geografis, Demografi*. Subang: Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

- Sumaryadi, I. N. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah, Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit. Citra Utama. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryana, E. (2023). "Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang. Subang: Tesis Universitas Subang Tidak Diterbitkan.
- Sutangsa, d. (2023). *Strengthening The Position of Intellectual Capital and Knowledge Management in Human Resource Management: An Overview* . KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 No. 1.
- Widodo, E. D. (2000). *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avirouz.
- Wikipedia. (2023). *Perencanaan*. Jakarta: Wikipedia Ensiklopedia Bebas.